

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DOKUMEN

MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



**SEKRETARIAT UTAMA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

DOKUMEN MITIGASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA BSSN

Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Biro Umum

A. UMUM

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan merupakan dokumentasi atas seluruh tahapan dalam pengelolaan risiko, baik untuk risiko strategis, risiko operasional maupun risiko proses. Dokumen Mitigasi Risiko bersifat dinamis, dalam artian akan terus berubah sesuai dengan tahapan serta penanganan yang dilakukan. Perubahan tersebut akan terjadi seiring dengan adanya risiko-risiko baru yang di awal belum teridentifikasi atau belum muncul.

Pengelolaan risiko di BSSN termasuk didalamnya pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa BSSN mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber Dan Sandi Negara. Sedangkan panduan dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BSSN sebagaimana diatur pada Pedoman Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Siber Dan Sandi Negara.

Dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan SPIP perlu ditetapkan kebijakan terkait implementasi unsur penilaian Risiko. Kebijakan tersebut meliputi Klasifikasi Risiko, Skala Kriteria Risiko, Selera Risiko dan Jenis Respon Risiko.

1. Klasifikasi Risiko

Risiko di BSSN diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Risiko Strategis
- b. Risiko Operasional
- c. Risiko Kecurangan
- d. Risiko Kepatuhan

2. Skala Kriteria Risiko

Skala kriteria Penilaian Risiko sebagai acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi risiko adalah sebagai berikut:

a. Skala Dampak

Skala dampak yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu Risiko

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

Nilai	INTERNAL						
	SKALA	KERUGIAN NEGARA	PERATURAN atau HUKUM	KEAMANAN ASET DAN INFORMASI	REPUTASI	OPERASIONAL	KINERJA
1	Tidak Berarti	Jumlah kerugian negara ≤ Rp 10 Juta	Tidak ada pelanggaran hukum	Tidak ada kebocoran atau kehilangan aset informasi	Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan atau tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 kali dalam satu tahun anggaran	Proses Bisnis tertunda ≤ 1 hari	Pencapaian target kinerja ≥ 100%
2	Kecil	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10 juta s.d Rp 50 juta	Pelanggaran ringan dengan teguran	Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 4	Keluhan pemangku kepentingan secara langsung lisan atau tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 kali dalam satu tahun anggaran	Proses Bisnis tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. < 100%
3	Sedang	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	Pelanggaran ringan dengan surat peringatan	Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 3	Pemberitaan negatif di dalam media massa lokal	Proses Bisnis tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. < 80%
4	Besar	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 100 juta s.d Rp 500 juta	Pelanggaran sedang yang dikenakan sanksi administratif	Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada lingkup unit kerja eselon 2	Pemberitaan negatif di dalam media massa nasional	Proses Bisnis tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. < 50%
5	Besar Sekali	Jumlah kerugian negara lebih Rp 500 juta	Pelanggaran berat dengan sanksi hukum	Berdampak pada kebocoran atau kehilangan aset informasi pada BSSN	Pemberitaan negatif di dalam media massa internasional	Proses Bisnis tertunda di atas 30 hari	Pencapaian target kinerja ≤ 25%

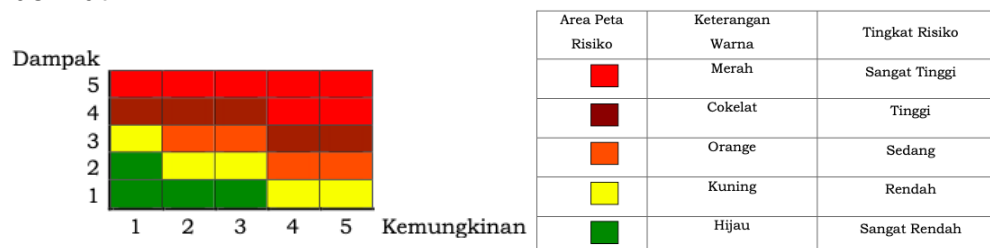
b. Skala Kemungkinan

Skala kemungkinan yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi





Nilai	Tingkat	Frekuensi Kemungkinan Terjadinya
1	Hampir pasti tidak terjadi	Risiko ini belum pernah terjadi, walaupun terjadi hanya 1 (satu) kali per tahun
2	Jarang	Kejadian terjadi 2 (dua) kali per tahun
3	Sedang	Kejadian lebih dari 2 (dua) kali per tahun, namun tidak lebih dari 5 (lima) kali per tahun
4	Sering	Kejadian lebih dari 5 (lima) kali per tahun, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali per tahun
5	Hampir pasti terjadi	Kejadian lebih dari 10 (sepuluh) kali per tahun

c. Tingkat Risiko

Tingkat Risiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak Risiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan tingkat Risiko. Tingkat Risiko menggunakan 5 (lima) skala tingkatan yang direpresentasikan dengan warna pada area Peta Risiko sebagai berikut:



Gambaran respon terhadap Risiko sesuai area warna sebagai berikut:

Area Peta Risiko	Keterangan
	berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
	berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan cokelat berjalan.
	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

3. Selera Risiko

Selera Risiko dalam Peta Risiko direpresentasikan dengan warna “hijau” yang bermakna memiliki tingkat risiko “sangat rendah”. Selera Risiko BSSN ditetapkan oleh Kepala BSSN dan Selera Risiko unit kerja ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja dan selaras dengan Selera Risiko BSSN.

4. Jenis Respon terhadap Risiko

Pemilik Risiko menetapkan respon atas setiap Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani. Pilihan respon Risiko dalam Penilaian Risiko yaitu:

- Menerima Risiko, yaitu pemilik Risiko menerima Risiko dan tidak melakukan intervensi apapun terhadap Risiko;
- Mitigasi (mengurangi Risiko), yaitu pemilik Risiko melakukan intervensi Risiko dengan membangun aktivitas pengendalian yang dapat mengurangi tingkat Risikonya;
- Membagi Risiko, yaitu pemilik Risiko mendistribusikan Risiko kepada pihak lain; atau
- Menolak Risiko, yaitu pemilik Risiko menetapkan menolak Risiko dengan tidak melakukan kegiatan terkait.

TINGKAT RISIKO						
Dampak	1	2	3	4	5	Kemungkinan
5	Red	Red	Red	Red	Red	
4	Dark Red	Dark Red	Dark Red	Dark Red	Dark Red	
3	Yellow	Orange	Dark Red	Dark Red	Dark Red	
2	Green	Yellow	Orange	Orange	Orange	
1	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	

5. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian Risiko terdiri dari tahapan penetapan konteks dan

analisis tujuan, identifikasi dan analisis Risiko serta evaluasi Risiko dan pengendalian terpasang. Langkah kerja penetapan risiko yaitu:

- a. Penetapan Konteks dan Analisis Tujuan
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisis Risiko
- d. Evaluasi Risiko dan
- e. Pengendalian Terpasang.

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

B. RISIKO STRATEGIS

1. Identifikasi Risiko

RISIKO STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA BSSN									
PEMILIK RISIKO :		Bagian Pengadaan Barang/Jasa							
KEGIATAN :		Identifikasi Risiko Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan risiko berdampak pada tujuan organisasi dan tujuan pengadaan							
TUJUAN KEGIATAN :		K1.T1 Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu K2.T2 Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan K3.T3 Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa							
No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Risiko		Penyebab		D/TD	Dampak	Klasifikasi Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Pernyataan	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	BPBJ	1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan	eksternal	TD	Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu	Strategis
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	BPBJ	Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa	eksternal	D	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Strategis
	Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	K3.T3.1	Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	BPBJ	1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa	internal	D	Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal	Strategis

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Strategis	BPBJ	1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan	Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu	5	2	10	Sedang
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	Strategis	BPBJ	Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	2	5	10	Sangat Tinggi
	Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	K3.T3.1	Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	Strategis	BPBJ	1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa	Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal	2	2	4	Rendah

3. Daftar Prioritas

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	Strategis	BPBJ	Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Sangat Tinggi
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Strategis	BPBJ	1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan	Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu	Sedang
	Meningkatnya persentase Tingkat Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	K3.T3.1	Rendahnya tingkat kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	Strategis	BPBJ	1. Kurangnya fasilitas layanan pengadaan barang/jasa 2. Kurangnya kompetensi personil terkait standar layanan pengadaan barang/jasa	Tingginya aduan layanan pengadaan barang/jasa dari stakeholder internal dan eksternal	Rendah

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

4. Evaluasi Risiko

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang		Pengendalian Dibutuhkan
									Uraian	E/KE/TE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	Strategis	BPBJ	Kurangnya pemahaman dari peserta penunjukkan langsung dan tender/seleksi terkait peraturan pengadaan barang/jasa	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Sangat Tinggi	Pengoptimalisasi Rapat Penjelasan, agar penyedia mempunyai gambaran untuk paket tersebut	E	- Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN)
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Strategis	BPBJ	1. Peserta yang mengikuti proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi tidak memenuhi persyaratan dalam proses pemilihan	Proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi yang mengakibatkan proses pemilihan tidak selesai tepat waktu	Sedang	Dibuatkan workshop atau seminar untuk penyedia terkait peraturan-peraturan pengadaan barang/jasa secara umum dan tata cara tender/seleksi secara umum	E	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN)

5. RTP

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	Strategis	Sangat Tinggi	- Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Februari 2021
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Strategis	Sedang	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Maret 2021

6. Pemantauan RTP

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Status			Keterangan	Residual Risk				Penjelasan
						S	SB	B		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)	
1	2	3	4	7	8									
1	Meningkatnya prosentase Proses pemilihan selesai tepat waktu	K2.T2.1	Banyaknya penawaran yang tidak sesuai dengan persyaratan pelelangan	- Optimalisasi Rapat penjelasan dengan penyedia - Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	2	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
	Meningkatnya persentase Kesesuaian penawaran dengan persyaratan pelelangan	K1.T1.1	Gagalnya proses penunjukkan langsung dan tender/seleksi	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	S			Risiko Telah Dikendalikan	5	2	10	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Profil Risiko

TINGKAT RISIKO						
Dampak						
5	• K2.T2.1					
4						
3						
2	• K3.T3.1			• K1.T1.1		
1						
	1	2	3	4	5	Kemungkinan

Area Peta	Tingkat Risiko
	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

No	Area Peta Risiko	Keterangan
1		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
2		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan.
3		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
4		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

C. RISIKO OPERASIONAL

1. Identifikasi Risiko

HASIL IDENTIFIKASI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA									
PEMILIK RISIKO :		Bagian Pengadaan Barang/Jasa							
KEGIATAN :		Identifikasi Risiko Operasional Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan risiko berdampak pada tujuan organisasi berdasarkan tupoksi UKPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan di organisasi BSSN							
TUJUAN KEGIATAN :		K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik							
No	Jenis Risiko	Kode Risiko	Risiko		Penyebab		D/TD	Dampak	Klasifikasi Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Pernyataan	Sumber			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	BPBJ	belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa	internal	D	Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal	operasional
	K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	BPBJ	Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE	internal	TD	Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE	operasional

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1.T1.1 Resiko Operasional - Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	operasional	BPBJ	belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa	Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal	2	5	10	Sangat Tinggi
	K1.T1.2 Resiko Operasional - pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	operasional	BPBJ	Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE	Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE	2	4	8	Tinggi

3. Daftar Prioritas

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	operasional	BPBJ	belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa	Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal	Sangat Tinggi
	K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	operasional	BPBJ	Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE	Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE	Tinggi

4. Evaluasi Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang		Pengendalian Dibutuhkan
									Uraian	E/KE/TE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	operasional	BPBJ	belum seragamnya kompetensi teknis pengelola pengadaan barang/jasa	Kinerja pengadaan barang/jasa menjadi kurang maksimal	Sangat Tinggi	1. Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan terkait proses pengadaan barang/jasa 2. Mengikutsertakan Pokja Pemilihan pada kegiatan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap proses pemilihan pengadaan barang/jasa seperti pelatihan, konferensi ataupun bimbingan teknis	E	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
	K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	operasional	BPBJ	Keterbatasan jumlah personil pengelola LPSE	Pengelolaan LPSE belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar 17 LPSE	Tinggi	1. Adanya pengelola LPSE yang terdiri dari helpdesk, administrator, verifikator 2. Melaksanakan LPSE sesuai dengan standar 17 LPSE	KE	1. Penambahan personil pengelola LPSE

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. RTP

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	operasional	Sangat Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Februari 2021
2	K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	operasional	Tinggi	1. Penambahan personil pengelola LPSE	- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola LPSE pada sisi manajerial - Pusdatik untuk mengelola LPSE pada sisi teknis sistem	2022

6. Pemantauan RTP

No	Tujuan Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Status			Keterangan	Residual Risk				Penjelasan
						S	SB	B		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)	
1	2	3	4	7	8									
1	K1.T1.1 Melaksanakan pengadaan barang/jasa	K1.T1.1	timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait proses pemilihan. 2. Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	2	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.
2	K1.T1.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	K1.T1.2	Dokumentasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik belum lengkap sesuai standar 17 LPSE	1. Penambahan personil pengelola LPSE	- Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola LPSE pada sisi manajerial - Pusdatik untuk mengelola LPSE pada sisi teknis sistem			B	Risiko Belum Dikendalikan	2	4	8	Tinggi	berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direpon.

7. Profil Risiko

TINGKAT RISIKO						
Dampak						
5	• K1.T1.1					
4	• K1.T1.2					
3						
2						
1						
	1	2	3	4	5	Kemungkinan

Area Peta	Tingkat Risiko
	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

No	Area Peta Risiko	Keterangan
1		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
2		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan.
3		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
4		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

D. RISIKO PROSES
PAKET PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG SISTEM INFORMASI LAYANAN PBJ
 1. Identifikasi Risiko

RISIKO PROSES PER PAKET PENGADAAN BARANG/JASA									
PEMILIK RISIKO :		Kelompok Kerja Pemilihan 2							
KEGIATAN :		1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa							
TUJUAN KEGIATAN :		K1.T1. Memperoleh Dokumen yang telah sesuai dan metode pemilihan yang tepat							
No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Risiko		Penyebab		D/TD	Dampak	Klasifikasi Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Pernyataan	Sumber			
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Internal	D	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Internal	D	Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Internal	D	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Internal	D	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	Internal	D	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.2	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Pokja Pemilihan	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	Internal	D	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.3	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	Internal dan Eksternal	D	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	Internal dan Eksternal	TD	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kecurangan
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	Eksternal	TD	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kecurangan
		K2.T2.6	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Internal	D	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.1	Revisi (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	5	2	10	Sedang
		K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1	5	5	Sangat Tinggi
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	3	4	12	Tinggi
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	5	4	20	Sangat Tinggi
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	2	4	8	Tinggi
		K2.T2.2	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	4	1	4	Rendah
		K2.T2.3	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	4	1	4	Rendah
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender	1	5	5	Sangat Tinggi
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta menduduki HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	1	5	5	Sangat Tinggi
		K2.T2.6	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	3	1	3	Sangat Rendah

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

3. Daftar Prioritas

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Sangat Tinggi
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Sangat Tinggi
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Tinggi
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Sedang

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. Evaluasi Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang		Pengendalian Dibutuhkan
									Uraian	E/KE/TE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran Hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Sangat Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	KE	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Sangat Tinggi	1. Berdasarkan templat Dokumen Pemilihan yang diterbitkan oleh LKPP 2. Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	KE	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi	Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	KE	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi	Belum ada	TE	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pelanggaran administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	KE	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses evaluasi	KE	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri dari Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Sedang	Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan dengan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	KE	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

6. RTP

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Sangat Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Sangat Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan setelah Dokumen Pemilihan disusun
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Sangat Tinggi	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Inspektorat	Pengawasan dilakukan pada saat proses pemilihan berjalan
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Sangat Tinggi	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat	Bagian Layanan Pengadaan	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha pada tahun 2020
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepatuhan	Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2020 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum hasil evaluasi ditetapkan dan diumumkan
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Sedang	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2020

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Informasi dan Komunikasi

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak	Informasi yang dibutuhkan	Sumber	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	1. Internet, penawaran pihak penyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review
		Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	1. Internet, penawaran pihak penyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review
		Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Koordinasi jadwal pengadaan dan pengawasan	Auditor Inspektorat	Inspektorat
		Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat	Materi pembinaan yang dibutuhkan Pelaku Usaha	Kuesioner kepada Pelaku Usaha	Bagian Layanan Pengadaan
		Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	1. Internet, penawaran pihak penyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review
		Kesalahan dalam proses evaluasi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan 2. Dokumen terkait proses evaluasi	1. Internet, penawaran pihak penyelenggara diklat dsb 2. Dokumen Pokja Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review
		Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan	Internet, penawaran pihak penyelenggara diklat dsb	Bagian Layanan Pengadaan

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

8. Pemantauan RTP

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO														
SEMESTER 2 / TAHUN 2019														
No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Status			Keterangan	Residual Risk				Penjelasan
						S	SB	B		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	3	3	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	4	1	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K2.T2.4	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Inspektorat	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	3	3	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K2.T2.5	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	3	3	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	3	2	6	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	2	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	5	1	5	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpson jika ada sumber daya tersisa.

9. Profil Risiko

Profil Risiko Paket Pengadaan Perangkat Pendukung Sistem Informasi Layanan PBJ						
Dampak						
5	● K1.T1.2 ● K2.T2.4					
4		● K2.T2.1	● K1.T1.3		● K1.T1.4	
3	▶ K1.T1.2 ▶ K2.T2.4					
2		▶ K2.T2.1	▶ K1.T1.3		● K1.T1.1	
1			● K2.T2.6	● K2.T2.2 ● K2.T2.3	▶ K1.T1.4 ▶ K1.T1.1	
	1	2	3	4	5	Kemungkinan

Area Peta	Tingkat Risiko
	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

No	Area Peta Risiko	Keterangan
1		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
2		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan.
3		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
4		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

PAKET PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG SISTEM INFORMASI LAYANAN PBJ

1. Identifikasi Risiko

HASIL IDENTIFIKASI RISIKO PER PAKET PENGADAAN BARANG/JASA									
PEMILIK RISIKO :		Kelompok Kerja Pemilihan							
KEGIATAN :		1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa							
TUJUAN KEGIATAN :		K1.T1. Memperoleh Dokumen yang telah sesuai dan metode pemilihan yang tepat							
No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Risiko		Penyebab		D/ID	Dampak	Klasifikasi Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Pernyataan	Sumber			
1	Pembangunan Power House	K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi	Internal	D	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Internal	D	1. Salah pilih penyedia 2. Gagai tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa	Kepatuhan
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Internal	D	1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagai tender 3. Pelanggaran administratif	Kepatuhan
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	PPK dan Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Internal	D	1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagai tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan	Kepatuhan
		K1.T1.5	Ketidaksihinggaan jenis kontrak dan ketidakcemeraman dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	PPK dan Pokja Pemilihan	1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko	Internal	D	1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara	Operasional
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	Internal	D	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.2	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Pokja Pemilihan	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	Internal	D	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.3	Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	Pokja Pemilihan	Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi	Internal dan Eksternal	D	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/ pengaduan	Operasional
		K2.T2.4	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	Internal dan Eksternal	D	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.5	Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	Pokja Pemilihan	1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam	Internal	D	1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagai Tender	Operasional
		K2.T2.6	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	Internal dan Eksternal	TD	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kecurangan
		K2.T2.7	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	Eksternal	TD	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kecurangan
		K2.T2.8	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence	Internal	D	1. Gagai tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Kepatuhan
		K2.T2.9	Salah memilih penyedia	Pokja Pemilihan	Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Internal	D	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Operasional
		K2.T2.10	Pengaduan	PPK dan Pokja Pemilihan	Persyaratan kualifikasi yang berlebihan	Internal	D	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagai tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata	Operasional
		K2.T2.11	Sanggah	Pokja Pemilihan	1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional	Eksternal	D	1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagai Tender	Operasional

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

2. Analisis Tingkat Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko	Tingkat Risiko (Sesuai Warna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Power House	K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	5	2	10	Sedang
		K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa	1	5	5	Sangat Tinggi
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif	3	4	12	Tinggi
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	PPK dan Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan	5	4	20	Sangat Tinggi
		K1.T1.5	Ketidaksihonestan jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko	1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara	2	4	8	Tinggi
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitinya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	2	4	8	Tinggi
		K2.T2.2	Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	4	1	4	Rendah
		K2.T2.3	Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/pengaduan	2	4	8	Tinggi
		K2.T2.4	Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Tidak ada peserta tender yang mampu melaksanakan pekerjaan baik secara kualifikasi, teknis, maupun harga 2. Syarat-syarat kualifikasi dan teknis penyedia pada Dokumen Pemilihan terlalu sulit	1. Tender ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	4	1	4	Rendah
		K2.T2.5	Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam	1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagal Tender	1	4	4	Tinggi
		K2.T2.6	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	1	5	5	Sangat Tinggi
		K2.T2.7	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	1	5	5	Sangat Tinggi
		K2.T2.8	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence	1. Gagal tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	3	3	9	Sedang
		K2.T2.9	Salah memilih penyedia	Operasional	Pokja Pemilihan	Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	4	3	12	Tinggi
		K2.T2.10	Pengaduan	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	Persyaratan kualifikasi yang berlebihan	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/pidana/perdata	1	4	4	Tinggi
		K2.T2.11	Sanggah	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional	1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagal Tender	3	4	12	Tinggi

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

3. Daftar Prioritas

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko
1	Pembangunan Power House	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa	Sangat Tinggi
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	PPK dan Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan	Sangat Tinggi
		K2.T2.6	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktek KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan dilambatkan sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi
		K2.T2.7	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif	Tinggi
		K1.T1.5	Ketidaksesuaian jenis kontrak dan ketidaktepatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko	1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Potensi kerugian negara	Tinggi
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi
		K2.T2.3	Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/ pengaduan	Tinggi
		K2.T2.5	Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam	1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagal Tender	Tinggi
		K2.T2.9	Salah memilih penyedia	Operasional	Pokja Pemilihan	Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi
		K2.T2.10	Pengaduan	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	Persyaratan kualifikasi yang berlebihan	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata	Tinggi
		K2.T2.11	Sanggah	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional	1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagal Tender	Tinggi
		K1.T1.1	Revisi (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Sedang
		K2.T2.8	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence	1. Gagal tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sedang

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

5. Evaluasi Risiko

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Aktivitas Pengendalian Sudah Terpasang		Pengendalian Dibutuhkan
									Uraian	E/KE/TE	
1	Pembangunan Power House	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menetapkan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Salah pilih penyedia 2. Gagal tender 3. Pekerjaan konstruksi tidak sesuai kebutuhan 4. Inefisiensi yang menyebabkan kerugian negara 5. Pengaduan atas pelanggaran mekanisme pengadaan barang/jasa	Sangat Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	KE	1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	PPK dan Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun Dokumen Pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kegagalan pelaksanaan pemilihan 2. Gagal tender 3. Sanggah/gugatan/pengaduan	Sangat Tinggi	1. Berdasarkan template Dokumen Pemilihan yang diterbitkan oleh LKPP 2. Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	KE	1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan
		K2.T2.6	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari pihak terkait (Pelaku Pengadaan atau Peserta Tender) untuk melakukan praktik KKN demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 2. Adanya penyalahgunaan jabatan guna mengintervensi proses pemilihan penyedia demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok 3. Konflik kepentingan antara pelaku pengadaan dengan peserta tender	1. Sanksi hukum karena dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan ditambah sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang 3. Penggantian Pokja Pemilihan 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi	Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pelaku Pengadaan dan Peserta Tender	KE	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
		K2.T2.7	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Peserta Tender	1. Adanya Niat atau Kesempatan dari seluruh atau beberapa peserta tender untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat demi memenangkan tender 2. Ditemukan adanya kesamaan dokumen teknis dari seluruh atau beberapa peserta 3. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS 4. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam satu kendali 5. Adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran dari seluruh atau beberapa peserta	1. Sanksi daftar hitam bagi peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Tender ulang jika seluruh peserta terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sangat Tinggi	Belum ada	TE	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam menyusun tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Kualitas penawaran yang rendah 2. Gagal tender 3. Pelanggaran administratif	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	KE	1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan
		K1.T1.5	Ketidaksesuaian jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	1. Kurangnya kompetensi dalam menentukan dan menyusun klausul kontrak 2. Tidak cermat 3. Tidak menerapkan manajemen risiko	1. Pelaksanaan kontrak terhambat 2. Sengketa kontrak 3. Polensi kerugian negara	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait manajemen kontrak	KE	1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Pokja Pemilihan	1. Kurangnya pengetahuan Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran 2. Kurang telitnya Pokja Pemilihan dalam melakukan proses evaluasi penawaran	1. Evaluasi penawaran ulang 2. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses evaluasi	KE	1. Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi
		K2.T2.3	Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	Ambiguitas dan ketidakjelasan persyaratan dalam dokumen kualifikasi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Gugatan/sanggah/pengaduan	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses kualifikasi	KE	1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjelasan pekerjaan 3. Pembinaan personal Pokja Pemilihan
		K2.T2.5	Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pokja Pemilihan tidak cermat dalam memeriksa dokumen dan latar belakang peserta tender 2. Belum ada sistem pemblokiran akun daftar hitam	1. Gugatan dari peserta tender 2. Sanggah dan Pengaduan 3. Perkara hukum 4. Gagat Tender	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait daftar hitam	KE	1. Integrasi SIKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu
		K2.T2.9	Salah memilih penyedia	Operasional	Pokja Pemilihan	Metode pemilihan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait proses kualifikasi	KE	1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks
		K2.T2.10	Pengaduan	Operasional	PPK dan Pokja Pemilihan	Persyaratan kualifikasi yang berlebihan	1. Pelaksanaan pekerjaan terhambat 2. Gagal tender 3. Tender ulang 4. hukuman disiplin/administratif/ pidana/perdata	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah	KE	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah
		K2.T2.11	Sanggah	Operasional	Pokja Pemilihan	1. Pemberian penjelasan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk klarifikasi dan menyamakan persepsi 2. Perubahan atas Dokpil hasil kesepakatan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Dokpil 3. Peserta tender tidak profesional	1. Pengaduan 2. Ketidakpercayaan publik 3. Gagat Tender	Tinggi	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait bagaimana cara menghadapi dan menjawab sanggah berdasarkan peraturan yang berlaku	KE	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan PPK	1. Dokumen persiapan pengadaan dari PPK yang terdiri atas Spesifikasi Teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, dll masih belum sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi sehingga perlu diperbaiki 2. Kurangnya pengetahuan PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan konstruksi	Waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih lama	Sedang	Sharing pengetahuan dan diskusi antara Pokja Pemilihan dengan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	KE	Pengembangan Kompetensi personal Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan
		K2.T2.8	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Kepatuhan	Pokja Pemilihan dan Peserta Tender	1. Penyusunan HPS tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Referensi penyusunan HPS kurang memadai 3. Penentuan HPS tidak didahului dengan market survey/market intelligence	1. Gagat tender 2. Tender ulang 3. Waktu pelaksanaan tender menjadi lebih lama	Sedang	Sharing pengetahuan dan diskusi antar Pokja Pemilihan terkait metode penyusunan HPS	KE	1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

6. RTP

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Klasifikasi Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pembangunan Power House	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Sangat Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran
		K1.T1.4	Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Sangat Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan setelah Dokumen Pemilihan disusun
		K2.T2.6	Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kecurangan	Sangat Tinggi	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Inspektorat	Pengawasan dilakukan pada saat proses pemilihan berjalan
		K2.T2.7	Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Kecurangan	Sangat Tinggi	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat	Bagian Layanan Pengadaan	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha pada tahun 2021
		K1.T1.3	Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	Kepatuhan	Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum tahapan dan jadwal pemilihan ditetapkan
		K1.T1.5	Ketidaksesuaian jenis kontrak dan ketidakcermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	Operasional	Tinggi	1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.1	Kesalahan dalam proses evaluasi	Kepatuhan	Tinggi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	1. Pengembangan kompetensi pada tahun 2021 2. Pengawasan dan Review dilakukan sebelum hasil evaluasi ditetapkan dan diumumkan
		K2.T2.3	Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	Operasional	Tinggi	1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjelasan pekerjaan 3. Pembinaan personil Pokja Pemilihan	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.5	Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	Operasional	Tinggi	1. Integrasi SiKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.9	Salah memilih penyedia	Operasional	Tinggi	1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.10	Pengaduan	Operasional	Tinggi	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.11	Sanggah	Operasional	Tinggi	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K1.T1.1	Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Kepatuhan	Sedang	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021
		K2.T2.8	Seluruh penawaran harga diatas HPS	Kepatuhan	Sedang	1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar	Bagian Layanan Pengadaan	Pengembangan kompetensi pada tahun 2021

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

7. Pemantauan RTP

No	Nama Paket Pengadaan Barang/Jasa	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak	Penanggung Jawab	Status			Keterangan	Residual Risk			Penjelasan	
						S	SB	B		Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Status Risiko		Tingkat Risiko (Sesuai Warna)
1	Pembangunan Power House	K1.T1.2	Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, persyaratan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian dokumen penawaran	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	3	3	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.
K1.T1.4		Penyusunan Dokumen Pemilihan yang kurang cermat, tidak konsisten dan tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan Dokumen Pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	5	1	5	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K2.T2.6		Ditemukan indikasi atau bukti adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pengawasan dari Inspektorat guna mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Inspektorat	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	3	3	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K2.T2.7		Ditemukan indikasi atau bukti pada hasil evaluasi penawaran adanya persaingan usaha tidak sehat	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha (Penyedia yang mengikuti tender di BSSN) terkait kerugian serta sanksi yang akan diterima apabila melakukan persaingan usaha tidak sehat	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	2	2	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K1.T1.3		Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan yang tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan konstruksi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait Penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	2	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K1.T1.5		Kelidaksesuaian jenis kontrak dan kelidakecermatan dalam menyusun klausul kontrak seperti inkonsistensi, hal-hal kritis yang tidak diatur rinci dan ketentuan yang multi tafsir	1. Peningkatan kompetensi manajemen kontrak 2. Menggunakan jasa ahli kontrak 3. Meminta pendapat hukum pada ahli yang kompeten	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	2	2	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K2.T2.1		Kesalahan dalam proses evaluasi	1. Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan terkait tata cara proses evaluasi penawaran 2. Pengawasan dan review dari Inspektorat terkait proses evaluasi	- Bagian Layanan Pengadaan untuk Pengembangan Kompetensi - Inspektorat untuk pengawasan dan Review	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	1	2	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K2.T2.3		Perbedaan penafsiran dalam pembuktian kualifikasi	1. Ketentuan kualifikasi dalam Dokpil harus jelas dan rinci 2. Ketentuan kualifikasi dibacakan dan diklarifikasi pada saat penjabaran pekerjaan 3. Pembinaan personil Pokja Pemilihan	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	2	1	2	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K2.T2.5		Penyedia yang sedang kena sanksi Daftar Hitam lulus kualifikasi	1. Integrasi SIKAP dengan Daftar Hitam 2. Akun Penyedia yang masuk Daftar Hitam diblokir/dibekukan dalam kurun waktu tertentu	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	2	2	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K2.T2.9		Salah memilih penyedia	1. Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Melibatkan Agen Pengadaan dalam proses barang/jasa yang strategis dan kompleks	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	4	1	4	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K2.T2.10		Pengaduan	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	1	2	2	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K2.T2.11		Sanggah	Bimbingan teknis aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	3	1	3	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	
K1.T1.1		Reviu (Kaji Ulang) dokumen persiapan pengadaan yang membutuhkan waktu lama	Pengembangan Kompetensi personil Pokja Pemilihan dan PPK terkait penyusunan dokumen persiapan pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	5	1	5	Rendah	berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direpon jika ada sumber daya tersisa.	
K2.T2.8		Seluruh penawaran harga diatas HPS	1. Bimbingan teknis penyusunan HPS 2. Memperbanyak referensi dan literatur market intelligence dan metode-metode analisis pasar	Bagian Layanan Pengadaan	S			Risiko Telah Dikendalikan	3	1	3	Sangat Rendah	berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).	

Dokumen Mitigasi Risiko Pengadaan Barang/Jasa BSSN

8. Profil Risiko

TINGKAT RISIKO						
Dampak						
5	• K1.T1.2 • K2.T2.6 • K2.T2.7					
4	• K2.T2.5 • K2.T2.10	• K1.T1.5 • K2.T2.1 • K2.T2.3	• K1.T1.3 • K2.T2.11		• K1.T1.4	
3			• K2.T2.8	• K2.T2.9		
2					• K1.T1.1	
1				• K2.T2.2 • K2.T2.4		
	1	2	3	4	5	Kemungkinan

Area Peta	Tingkat Risiko
	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

No	Area Peta Risiko	Keterangan
1		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
2		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan.
3		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
4		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

E. KONSOLIDASI PROFIL RISIKO

Di bawah ini merupakan hasil konsolidasi profil risiko dari 4 (empat) profil risiko diatas. Konsolidasi ini dilakukan berdasarkan satu risiko di setiap profil dengan nilai Probabilitas dan Dampak terbesar.


PROFIL RISIKO PAKET KONSOLIDASI						
Dampak						
5	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Proses Paket 1 • Risiko Proses Paket 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Strategis • Risiko Operasional 				
4						
3						
2						
1						
	1	2	3	4	5	Kemungkinan

Area Peta	Tingkat Risiko
	Sangat Rendah
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Sangat Tinggi

No	Area Peta Risiko	Keterangan
1		berpotensi tinggi mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga prioritas untuk direspon.
2		berpotensi sedang mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga akan direspon setelah area merah dan orange tua berjalan.
3		berpotensi rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat direspon jika ada sumber daya tersisa.
4		berpotensi sangat rendah mengancam pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat diabaikan (diterima).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dihadapkan dengan Risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan. Untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko, Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan penilaian Risiko atas strategis, operasional dan proses yang dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko meliputi tahapan identifikasi, analisis, evaluasi Risiko dan pengendalian terpasang serta menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko serta menggambarannya dalam bentuk profil risiko.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan **Risiko** prioritas yang akan ditangani berdasarkan garis tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance*). Risiko dan pelaksanaan RTP yang telah disusun tersebut akan dilakukan pemantauan secara berkelanjutan baik oleh Pemilik Risiko maupun Inspektorat sebagai unsur pengawasan di BSSN. Dengan komitmen yang tinggi dan pengelolaan Risiko secara efektif, akan membantu Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mencapai tujuan, meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tosany Sofyan Harnowo, S.Pd. NIP. 19771208 199812 1 001
--	--

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara